



▶ PROGRAM PEMKOT

Dewan Soroti Mekanisme KMS

UMBULHARJO-
Komisi D DPRD Kota
Jogja menyoroti
masih banyaknya
salah sasaran
dalam penerimaan
kartu menuju
sejahtera (KMS).

Sekar Langit Nariswari
sekar@harianjogja.com

Penambahan parameter penerima
KMS diminta menunggu hasil
evaluasi yang dilakukan antara
eksekutif dan legislatif. Wakil

- ▶ Permasalahan KMS menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
- ▶ Daftar penerima KMS pada tahun ini berjumlah 17.253 KK.

Ketua Komisi D DPRD Kota
Jogja Antonius Fokki Ardiyanto
mengatakan ada sejumlah hal yang
menjadi bahan pencermatan wakil
rakyat itu. "Masih banyak salah
sasaran penerima KMS, dibuktikan
masih banyaknya golongan mampu
yang mendapatkan KMS," katanya,
Jumat (5/1).
Fokki menambahkan masih

banyak ditemui orang tua siswa yang ketika mengantar anaknya sekolah menggunakan kendaraan pribadi atau perhiasan. Padahal, siswa yang dimaksudkan mendaftar dengan berbekal KMS.

Selain itu, ia menilai jika selama ini permasalahan KMS menimbulkan konflik sosial di masyarakat terutama karena hal itu. Melekatnya program khusus di bidang pendidikan itu menjadikan KMS memiliki nilai lebih. Karena itu, mekanisme penambahan kategori penerima KMS sebaiknya menunggu evaluasi dari DPRD.

Terlebih lagi, tambah Fokki, Pemkot berencana menambah kategori penerima KMS dari sebelumnya tiga kategori menjadi empat kategori. Diketahui jika ada tambahan kategori penerima KMS tahun ini. Kategori pertama adalah warga yang benar-benar miskin, kedua adalah warga miskin, ketiga adalah warga rentan miskin, dan keempat yang akan direncanakan yaitu warga yang sebenarnya tidak layak menjadi penerima KMS, namun masih belum mampu mandiri.

Kepala Dinas Sosial Kota Jogja Bejo Suwarno menerangkan daftar penerima KMS pada tahun ini berjumlah 17.253 KK. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 lalu yang sebanyak 18.651 KK. Meski jumlahnya menurun, ia mengatakan parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah penerimanya masih sama seperti tahun lalu.

"Harapannya kesejahteraan meningkat dengan pengurangan ini," katanya.

Ia mengakui keberadaan KMS dengan keuntungan di sektor pendidikan menjadi potensi permasalahan sendiri. Dengan berbekal KMS, warga yang bersangkutan bisa menikmati kuota jumlah penerimaan termasuk pembiayaan di sekolah negeri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005